



**GAMBARAN PENGETAHUAN PERANGKAT DESA TENTANG PROGRAM DESA
TANGGUH DI KOTA LHOKSEUMAWE**

Oleh

Yusrawati, Mawar Hayati¹, Fitriana dewi²

^{1,2}Politeknik Kesehatan Aceh, Prodi D3 Keperawatan Aceh Utara

Email: yusrawatiaishy@gmail.com

Abstrak

Indonesia negara kepulauan dengan pengaruh vulkanisme dan tektonisme menduduki peringkat ke-40 (risiko tinggi) diantara 181 negara rentan bencana (*The World Risk Index, 2020*). Gempa bumi, banjir, dan tanah longsor adalah bencana yang paling sering terjadi dan berpotensi mengakibatkan adanya kerusakan pada aset di Indonesia, dimana penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta. Oleh karena itu pemerintah harus menjadi motor penggerak masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada tahap pra, saat dan pasca bencana. Salah satu program unggulan nasional untuk pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah program desa tangguh bencana, akan tetapi di Kota Lhokseumawe program tersebut sama sekali belum berjalan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk menilai tingkat pengetahuan perangkat desa sebagai pejabat pelaksana pemerintahan di tingkat desa, apakah mereka cukup memahami dan tersosialisasi dengan baik tentang Program Desa tangguh Bencana ini? Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yaitu kechiek dan sekretaris desa (sekdes) dalam wilayah Kota Lhokseumawe dengan tehnik pengambilan sampel menggunakan random sampling dan desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang di sampaikan melalui whatsapp kepada kechiek dan sekdes dari tanggal 13 sampai 18 Agustus 2022. Analisa statistik yang digunakan adalah distribusi frekuensi yang terdiri dari variabel karakteristik responden dan variabel pengetahuan perangkat desa tentang program desa tangguh bencana di Kota Lhokseumawe. Adapun luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat mencetak modul ber-ISBN, memperoleh sertifikat HAKI dan terpublikasi pada jurnal terakreditasi SINTA 1-6. Tingkat Kesiapterapan Teknologi penelitian ini adalah 3.

Kata kunci; Perangkat Desa_kunci; Program Desa Tangguh Bencana

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rawan bencana. Indonesia juga negara kepulauan dengan pengaruh vulkanisme dan tektonisme menduduki peringkat ke-40 (risiko tinggi) diantara 181 negara rentan bencana (*The World Risk Index, 2020*). Gempa bumi, banjir, dan tanah longsor adalah bencana yang paling sering terjadi dan berpotensi mengakibatkan adanya kerusakan pada aset di Indonesia. Kerugian ini membuat Indonesia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pada, periode 2000-2016 terdapat beban

rata-rata Rp22,8 triliun per tahun untuk menanggulangi bencana alam maupun non alam (Kemenkeu, 2020).

Pendekatan penanggulangan bencana di Indonesia lebih berkiblat pada negara yang egalitarian dimana melihat bencana dapat ditanggulangi bersama dengan mengedepankan semangat modal sosial berupa partisipatoris semua anggota masyarakat. Hal ini kemudian berimplikasi kepada menebalnya solidaritas masyarakat dalam setiap event bencana yang bisa saja terjadi setiap saat (Jati, WR. 2013). Oleh karena itu Penanggulangan bencana



adalah tanggung jawab semua pihak, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta. Dimana masyarakat adalah pihak pertama yang mengalami ancaman, akibat, dampak dari suatu bencana disamping itu masyarakat juga pelaku aktif dalam pemulihan dan membangun kembali kehidupannya pasca bencana. Dengan demikian masyarakat menjadi dasar tempat dilakukan investasi penanggulangan bencana dan masyarakat juga pelaku utama yang membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan penting dalam penanggulangan bencana. Semua sumber daya sosial budaya, semua unsur, struktur dan proses-proses interaksi internal dan eksternal adalah modal kehidupan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Akan tetapi bila dampak bencana mengganggu keberfungsian masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian fisik, sosial, ekonomi dan masyarakat tidak dapat menangani sendiri maka negara dengan melibatkan swasta wajib hadir sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang (UNISDR,2004).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

Data BNPB melalui aplikasi InaRISK dan kajian risiko bencana oleh di 34 provinsi dari tahun 2012 sampe 2020 sudah 8 ribuan desa terbentuk dan melaksanakan program desa tangguh dari 74 ribuan desa yang ada di Indonesia, hal ini masih sangat jauh dari target. Sementara terdapat sebanyak 45.973 desa rawan terhadap gempa bumi, 5.744 desa rawan

terdampak tsunami, 2.160 desa rawan dan terdampak gunung meletus, 34.716 desa rawan longsor, 37.497 desa rawan kebakaran hutan, 41.236 desa rawan kekeringan dan sebanyak 47.430 desa rawan terdampak banjir (bnpb.go.id, 2020). Oleh karenanya dalam mengurangi risiko tersebut, pengetahuan dan pemahaman perangkat desa untuk melaksanakan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di desanya sangatlah penting. Landasan hukum dan rujukan dalam mengimplementasikan program Destana adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB No. 1/2012).

Menurut Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI 2019) Aceh termasuk provinsi dengan indeks resiko tinggi bencana dengan score 157.56, oleh karena itu pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha/swasta harus sama-sama bergerak untuk mempersiapkan masyarakat di tingkat desa untuk tangguh dan survive dalam menghadapi bencana sebagai mana visi BNPB Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Akan tetapi kenyataan dilapangan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe belum ada desa yang melaksanakan program desa tangguh bencana diwilayahnya (bpbdlhokseumawe.go.id, 2022). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui mengapa bisa terjadi demikian? Sehingga untuk awal penelusuran masalah peneliti mengasumsi bahwa perangkat desa tidak ada pengetahuan dan pemahaman tentang program desa tangguh sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat desa tangguh menghadapi bencana. Dengan demikian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran pengetahuan perangkat desa tentang program desa tangguh bencana di kota Lhokseumawe?



LANDASAN TEORI

Pengetahuan.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terbentuk setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Terdapat beberapa tingkatan dari pengetahuan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Menurut Rachmawati 2019, pengetahuan dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal terdiri dari pendidikan, minat, pengalaman, dan usia, sedangkan faktor eksternal terdiri dari ekonomi dan kebudayaan.

Desa dan Perangkat Desa

Pengertian Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Program Desa Tangguh Bencana

Menurut Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 pengertian Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan

strategi- strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB) 2020-2024 meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia. Mengacu pada Renas-PB tersebut, maka Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga melaksanakan hal yang sama di tingkat desa. Adapun tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Kegiatan Dalam Mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana meliputi:

1. Pengkajian risiko Desa/Kelurahan mulai dengan menilai ancaman, kerentanan, kapasitas dan menganalisis Risiko Bencana.
2. Perencanaan PB dan Perencanaan Kontinjensi Desa/Kelurahan dengan



menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan dan rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan.

3. Pembentukan forum PRB Desa/Kelurahan dan tim siaga bencana masyarakat.
4. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB.
5. Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legalisasi.
6. Pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan.
7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Kelurahan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian (Setiadi, 2007). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif murni, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan perangkat desa tentang desa tangguh bencana di wilayah Kota Lhoskeumawe tahun 2022 meliputi 7 aspek dan 60 indikator pelaksanaan program desa tangguh bencana.

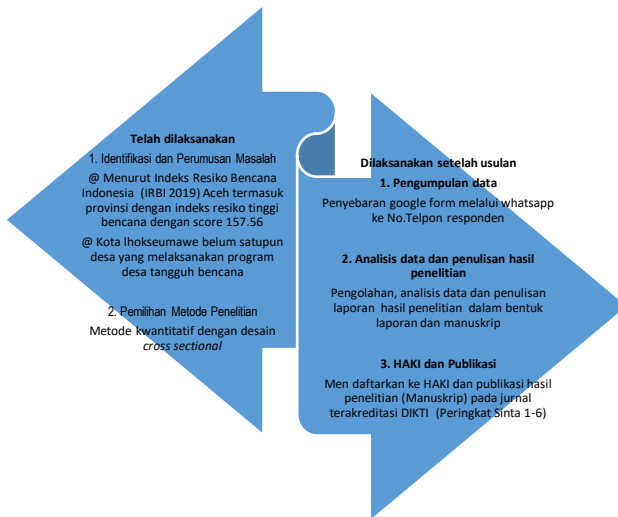
Populasi penelitian ini adalah semua perangkat desa (kechiek, sekdes, tuha peut, imam, atau lainnya) yang mewakili jabatan tersebut yaitu sebanyak 136 dan sampel dalam penelitian ini sebesar 30% dari total populasi yang diambil dengan teknik random sampling berdasarkan jumlah desa di setiap kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Lhoskeumawe (bps kota lhoskeumawe, 2022), maka besar sampel penelitian ini adalah 41 responden. Kuesioner disebarkan melalui media sosial *whatsapp* dalam bentuk *google form* kepada nomor handphone yang bersangkutan.

Definisi operasional penelitian ini tergambar sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala Ukur	Hasil Ukur
1	Pendidikan	Pendidikan terakhir yang telah diselesaikan responden saat mengisi kuisioner	Kuesioner	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dasar ▪ Menengah ▪ Tinggi
2	Pengalaman/lama masa jabatan	Jumlah lama waktu responden menduduki jabatan kechiek atau sekdes	Kuesioner	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama ▪ Baru
3	Pelatihan	Kegiatan pelatihan, sosialisasi yang pernah diikuti responden tentang kebencanaan selama jabatan kechiek atau sekdes	Kuesioner	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sering ▪ Jarang ▪ Tidak pernah
4	Pengetahuan	Hasil tahu responden terhadap program desa tangguh bencana	Kuesioner	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Baik ▪ Buruk

Gambar 1. Skema Alur Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 18 Agustus 2022 pada perangkat desa wilayah kerja Kota Lhokseumawe dengan jumlah sampel yang digunakan sebagai responden 41 orang. Berdasarkan data diperoleh, distribusi gambaran pengetahuan perangkat desa tentang program desa tangguh bencana sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden

Tabel 2 : Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Karakteristik Responden (n=41)

Umur Orang Tua	Frekuensi (n)	Persentase (%)
30 - 40 tahun	9	21,9
41 - 50 tahun	20	48,8
>51 tahun	12	29,3
Total	41	100
Kecamatan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Muara Satu	7	17
Muara Dua	10	24,4
Blang Mangat	12	29,3

Banda Sakti	12	29,3
Total	41	100
Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
SLTA Sederajat	17	41,5
D3	5	12,2
S1	17	41,5
S2	2	4,8
Total	41	100
Jabatan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kepala Desa	23	56
Sekdes	18	44
Total	41	100
Masa Jabatan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
3 – 12 bulan	5	12,2
1 – 5 tahun	22	53,7
6 – 10 tahun	14	34,1
Total	41	100

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat di lihat bahwa dari 41 responden mayoritas berusia 41 – 50 tahun sebanyak 20 responden (48,8%), mayoritas responden berasal dari kecamatan Blang Mangat dan Banda Sakti masing-masing sebanyak 12 responden (29,3%), dengan mayoritas pendidikan responden S1 dan SLTA Sederajat sebanyak masing-masing 17 responden (41,5%), mayoritas jabatan responden kepala desa yaitu sebanyak 20 orang (48,7%) dan mayoritas lama masa jabatan responden 1- 5 tahun sebanyak 22 orang (53,7%).

b. Variabel Pengetahuan Perangkat Desa Tentang Program Desa Tangguh Bencana

Tabel 3 : Distribusi Frekuensi dan Persentase Pengetahuan Perangkat Desa Tentang Program Desa Tangguh Bencana di Kota Lhokseumawe



No.	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	Kurang Baik	13	31,7
2.	Baik	28	68,3
Jumlah		41	100

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi berdasarkan variabel pengetahuan perangkat desa tentang program desa tangguh bencana berada pada kategori baik yaitu sebanyak 28 responden (68,3%) dan frekuensi terendah berada pada kategori kurang baik yaitu sebanyak 13 responden (31,7%).

Berdasarkan hasil analisa data penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang peneliti lakukan di wilayah kerja kota Lhokseumawe pada tanggal 13 – 18 Agustus 2022 maka pembahasan dari hasil penelitian gambaran pengetahuan perangkat desa tentang program desa tangguh di Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 sebagai berikut:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Desa tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang dirugikan. Pengembangan desa tangguh bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat (Perka No.1, 2012).

Pasal 4 Undang-Undang no. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Maka untuk

terlaksananya desa tangguh bencana diperlukan peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam rencana dan pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Dalam proses mewujudkan desa tangguh bencana, masyarakat harus menjadi pelaku utama, sebagai subjek yang berpartisipasi dan bukan objek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna, meskipun dukungan teknis dari pihak luar sangat dibutuhkan. Maka dari itu perangkat desa seperti geuchik, sekretaris desa, dll, sebagai tokoh yang mampu menggerakkan masyarakat harus mempunyai pengetahuan dan informasi yang sangat baik tentang desa penanggulangan bencana sehingga dengan sendirinya mampu bersama-sama warga masyarakat menyusun rencana penanggulangan bencana terutama masyarakat di kawasan rawan bencana.

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*). Perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan dan tradisi sebagai faktor predisposisi disamping faktor pendukung seperti lingkungan fisik, prasarana dan faktor pendorong yaitu sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lainnya (Notoatmodjo, 2003, hal. 140).

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata pendidikan responden adalah sarjana strata 1 dan SMA/ sederajat, meskipun sebagian responden dengan latar pendidikan SMA perangkat desa sudah lebih banyak paham tentang program desa tangguh bencana dimana



dapat dilihat frekuensi tertinggi pengetahuan responden berada pada kategori baik. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu obyek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari obyek yang diketahui, akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap obyek tersebut. Dalam hal ini aspek positif dapat dipengaruhi oleh usia responden yang mayoritas 40 -50 tahun (usia produktif). Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikologis (mental) menjadi lebih matang dan lebih siap menerima informasi dengan baik. Selain itu pengalaman dan pengetahuan seseorang juga dapat dipengaruhi oleh masa kerja, makin lama masa kerja maka pengetahuan akan semakin bertambah. Oleh sebab itu, semakin banyak aspek positif atau semakin baik pengetahuan tentang program desa tangguh bencana ini diketahui oleh perangkat desa maka semakin besar kemungkinannya program ini di sosialisasi dan dilaksanakan pada desa masing-masing untuk mendukung program pemerintah dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, sesuai dengan tanggungjawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perka no 1, 2012)

PENUTUP

Kesimpulan

Bencana dapat terjadi kapan saja. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta. Pemerintah harus menjadi motor penggerak masyarakat agar tangguh menghadapi bencana dan mampu bertahan hidup pasca bencana tanpa bantuan pihak luar. Dari hasil penelitian ini di simpulkan bahwa pengetahuan perangkat desa tentang program desa Tangguh bencana berada pada kategori

baik, tetapi program desa Tangguh bencana belum dilaksanakan di banyak desa di Kota Lhokseumawe. Perangkat desa menjadi penggerak utama pemberdayaan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana di Kota Lhokseumawe.

Saran

Diharapkan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat mengintensivikan sosialisasi program desa Tangguh kepada perangkat desa agar perangkat yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan yang cukup tentang program desa Tangguh segera membentuk dan melaksanakan program desa Tangguh bencana di Kota Lhokseumawe

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hidayat, Anwar. 2022. Menghitung Besar Sampel Penelitian. Statistikian.com
- [2] <http://lhokseumawekota.bps.go.id>. 2022. Kota Lhokseumawe Dalam Angka.
- [3] <http://kemenkeu.go.id>. 2021. Kerugian Akibat Bencana.
- [4] <http://bpbdkotalhokseumawe>. 2022 Program kerja.
- [5] <http://bnpb.go.id>. 2020. Kajian Resiko Bencana.
- [6] <https://bnpb.go.id>. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- [7] <https://bnpb.go.id>. Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Program Desa Tangguh Bencana
- [8] <https://bnpb.go.id>. Indeks Risiko Bencana Indonesia 2019.
- [9] Jati, Wasisto.R, 2013. Analisis Penanggulangan Bencana Berbasis Perspektif *Cultural Theory*. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol.IV No. 1.
- [10] Rachmawati, Windi Chusniah, SKM, M.Kes, 2019. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; Malang. Wineka Media.



-
- [11] Setiadi. (2007). Konsep & Penulisan Riset Keperawatan. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu